

Pembelajaran Sejarah Berbasis Sejarah Lokal Peran Blitar dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1948-1950

Aditya Nugroho Widiadi¹, Wahyu Djoko Sulisty¹, Lutfiah Ayundasari¹,
Ari Sapto¹, Muhammad Aqib Nur Habibi¹, Mellina Nur Hafida¹, Gedhe Ashari¹,
Edna Sari Kusuma Dewi²

¹Universitas Negeri Malang, Indonesia

²SMAN 1 Talun, Blitar, Indonesia

¹aditya_widiadi@um.ac.id

Abstract

This study analyses Blitar's role as one of the Republic of Indonesia's guerrilla bases during the Dutch military aggression period and the struggle for independence. Located in East Java, Blitar has a long history, starting from the Dutch colonial period, the Japanese occupation, to the post-proclamation of Indonesian independence. Blitar became an important centre for military and emergency government activities in East Java, especially after the Dutch launched Military Aggression I and II. This research illustrates how Blitar became a gathering place for long march troops from various regions, as well as the formation of a military government structure that played an important role in defending the sovereignty of the Republic of Indonesia. Using data from various sources, including official reports and historical studies, this research seeks to present a picture of the socio-political and military dynamics in Blitar during this critical time in Indonesian history. However, despite its significant role, local history studies related to Blitar's role in this struggle are still minimally explored in history learning in schools. Therefore, the integration of Blitar's local history in the curriculum is expected to strengthen students' understanding of the importance of their region's contribution to national history.

Keywords: *Struggle to Defence Independence; Local History; Education*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Blitar sebagai salah satu basis gerilya Republik Indonesia selama periode agresi militer Belanda dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Terletak di Jawa Timur, Blitar memiliki sejarah panjang, mulai dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Blitar menjadi pusat penting bagi kegiatan militer dan pemerintahan darurat di Jawa Timur, terutama setelah Belanda melancarkan Agresi Militer I dan II. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Blitar menjadi tempat berkumpulnya pasukan hijrah dari berbagai daerah, serta pembentukan struktur pemerintahan militer yang memainkan peran penting dalam upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dengan menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi dan kajian sejarah, penelitian ini berusaha menyajikan gambaran tentang dinamika sosial-politik dan militer di Blitar selama masa-masa kritis dalam sejarah Indonesia. Namun, meskipun memiliki peran signifikan, kajian sejarah lokal terkait peran Blitar dalam perjuangan ini masih minim dieksplorasi dalam pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, integrasi sejarah lokal Blitar dalam kurikulum diharapkan dapat memperkuat pemahaman siswa tentang pentingnya kontribusi daerah mereka dalam sejarah nasional.

Kata Kunci: *Mempertahankan Kemerdekaan; Sejarah Lokal; Pendidikan*

Pendahuluan

Blitar, sebuah daerah di provinsi Jawa Timur, memiliki peranan dalam sejarah Indonesia, misalnya selama masa kolonialisme Belanda dan perjuangan kemerdekaan. Pada masa kolonial, Blitar memiliki peranan pada kegiatan ekonomi yang cukup signifikan, terutama dalam sektor industri perkebunan. Produk-produk utama seperti kopi, teh, dan karet dari perkebunan di sekitar lereng Gunung Kelud dan Lembah Sungai Brantas diekspor ke pasar internasional, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tulang punggung ekonomi. Selain itu, penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda turut mendorong perkembangan pendidikan di Blitar, dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (Sasmita, 2011).

Namun, pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945 membawa penderitaan baru bagi masyarakat Blitar. Kebijakan Jepang yang memaksa penduduk bekerja keras untuk kepentingan militer mereka memperparah kesulitan ekonomi dan sosial yang sudah ada, meskipun juga memupuk semangat nasionalisme dan perjuangan di kalangan masyarakat (Dewi, 2019; Susila, 1994). Blitar kemudian menjadi salah satu basis penting bagi para pejuang kemerdekaan, terutama selama masa Agresi Militer Belanda II. Meskipun memiliki peran strategis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sejarah lokal Blitar terkait masa perjuangan tersebut masih kurang tereksplorasi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.

Hal ini mencerminkan adanya kekurangan dalam pembahasan sejarah lokal Blitar, terutama dalam mengangkat peristiwa-peristiwa penting seperti perlawanan masyarakat Blitar dalam menghadapi penjajah Belanda. Berdasarkan data yang didapat dari survei awal (23 April-3 Mei 2024) terdapat 167 responden yang terdiri dari siswa SMA sederajat dan guru. Dari survei tersebut belum ditemukan bahan ajar atau media pembelajaran khusus yang secara komprehensif membahas sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Blitar pada tahun 1945-1949. Minimnya pembahasan ini menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah, terutama di wilayah Blitar, yang seharusnya bisa mengangkat kearifan lokal dan peran penting daerah ini dalam sejarah nasional.

Tanpa adanya pengintegrasian sejarah lokal ke dalam kurikulum, siswa cenderung kehilangan pemahaman mendalam tentang bagaimana daerah mereka berkontribusi dalam sejarah bangsa. Pengembangan pembelajaran berbasis sejarah lokal Blitar tidak hanya akan membantu siswa memahami peristiwa sejarah secara lebih kontekstual, tetapi juga memperkuat rasa bangga dan identitas lokal yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, pengembangan pembelajaran tentang sejarah perjuangan Blitar pada masa 1945-1949 sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan dalam pembelajaran sejarah. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diajak untuk memahami peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga diperkenalkan pada kontribusi nyata daerah mereka dalam membentuk identitas dan kedaulatan bangsa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Blitar pada tahun 1948-1950. Metode Historis yang digunakan terdiri dari empat tahapan diantaranya *heuristic*, *kritik*, *interpretasi* dan *historiografi* (Herlina, 2020). Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan memilih calon informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait peristiwa sejarah yang diteliti, seperti veteran perang dan warga yang tinggal di sekitar lokasi pertempuran. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data dari

informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan sumber primer, seperti veteran dan warga setempat, serta penelusuran arsip dan dokumen di perpustakaan yang relevan dengan kajian penelitian. Kemudian, kegiatan analisis data dilakukan melalui tahap kritik sumber untuk menilai keaslian dan kredibilitas data yang didapat, dilanjutkan dengan interpretasi fakta-fakta yang telah diverifikasi, lalu dilanjutkan pada kegiatan penyusunan narasi sejarah pada tahap historiografi dimana hasil penelitian ini dapat menjadi sumber penting untuk mengembangkan bahan ajar yang berfokus pada sejarah lokal Blitar. Mengintegrasikan kisah-kisah perjuangan lokal ke dalam materi pelajaran tidak hanya akan memperkaya pengetahuan siswa, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka terhadap kontribusi daerah dalam perjuangan nasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa dapat lebih memahami relevansi sejarah lokal dalam membentuk identitas nasional, serta memperkuat keterkaitan antara sejarah nasional dan pengalaman masyarakat lokal. Hal ini penting untuk menanamkan kesadaran sejarah dan meningkatkan minat siswa pada pembelajaran sejarah, khususnya mengenai peristiwa yang memiliki hubungan langsung dengan lingkungan dan budayanya.

Hasil dan Pembahasan

1. Blitar sebagai Basis Gerilya Republik

Kabupaten Blitar dan Kota Blitar merupakan salah satu bagian wilayah Jawa Timur. Blitar berada di sebelah selatan Garis Khatulistiwa, terletak pada $111^{\circ}40'1''-112^{\circ}10'1''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}58'1''-8^{\circ}9'51''$ Lintang Selatan. Kabupaten Blitar di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, batas wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, di timur dengan Kabupaten Malang dan barat dengan Kabupaten Tulungagung (BPS Kabupaten Blitar, 2024), sedangkan di tengah wilayah Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kota Blitar. Menurut BPS Kabupaten Blitar (2024) luas Kabupaten Blitar adalah $1.588,79 \text{ Km}^2$ atau 158.879 Ha . Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Wonotirto dengan luas $164,54 \text{ Km}^2$, wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Sanankulon yaitu $33,33 \text{ Km}^2$. Hamparan wilayah Kabupaten Blitar merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata $+100$ meter di atas permukaan air laut, sedangkan menurut BPS Kota Blitar (2024) dengan luas wilayah hanya $32,57 \text{ Km}^2$, Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Secara administratif, Kota Blitar terdiri dari 3 kecamatan, yang masing-masing terbagi menjadi 7 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas $12,15 \text{ Km}^2$, diikuti oleh Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas $10,50 \text{ Km}^2$ dan Kecamatan Sukorejo dengan luas $9,92 \text{ Km}^2$ (BPS Kota Blitar, 2024).

a. Blitar Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, industrialisasi di wilayah Blitar mencakup industri berbasis pedesaan (*rural-based*) dan perkotaan (*urban-based*) (Sasmita, 2011). Industri berbasis pedesaan meliputi perkebunan di wilayah Kabupaten Blitar, terutama di sekitar lereng Gunung Kelud dan Lembah Brantas. Perindustrian di Blitar berkembang berkat sarana dan prasarana yang terus ditingkatkan. Jalan-jalan desa telah menjangkau hingga pelosok pedalaman dan daerah perkebunan. Para pengusaha perkebunan memperbaikinya untuk memudahkan transportasi barang. Selain itu, jalan raya yang menghubungkan pusat kota juga dibangun oleh pemerintah kolonial, lengkap dengan pemberian nama dan kelas jalan pada tahun 1923. Pada tahun 1939, terdapat 45 perusahaan perkebunan yang mengelola berbagai tanaman seperti kopi, karet, kina, teh, tebu, tembakau, kapuk, singkong dan kelapa dengan unit pengolahan sendiri (Sasmita, 2011). Sementara itu, industri berbasis perkotaan di *Gemeente* Blitar mencakup jasa komunikasi, transportasi, hotel, layanan kesehatan, listrik, air bersih, penyediaan BBM, konstruksi. Terdapat juga industri jasa komunikasi yang meliputi pos, telegraf dan telepon

(Sasmita, 2011). Pemerintah Kolonial juga mengembangkan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, terutama setelah diterapkannya Politik Etis. Berbagai lembaga pendidikan didirikan oleh pemerintah dan swasta (Tionghoa, bumiputera, serta organisasi keagamaan Islam dan Katholik) di Blitar, mulai dari sekolah dasar (ELS, HIS, HCS) hingga sekolah menengah (MULO, *Jongens Normaalschool* dan *Meisjes Normaalschool*) serta sekolah calon pamong praja bumiputera (OSVIA) (Sasmita, 2011). Namun, sekolah kejuruan yang sesuai dengan pengembangan industri tidak didirikan di Blitar melainkan di Malang dan Kediri (Sasmita, 2011). Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Blitar mengalami perubahan. Menurut Ricklefs (2005), kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, menghapus pengaruh-pengaruh Barat dan memobilisasi demi kemenangan Jepang. Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya oleh Pemerintah Kolonial Belanda digunakan Jepang untuk mendukung kebutuhan perang. Jepang fokus pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal untuk mendukung upaya militer mereka. Industri perkebunan tetap beroperasi, namun hasilnya sebagian besar diserahkan kepada Jepang untuk kepentingan perang.

Pendidikan selama masa pendudukan Jepang juga mengalami perubahan yang signifikan (Susila, 1994). Sistem pendidikan yang telah ada diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan Jepang. Sekolah-sekolah difokuskan pada pengajaran bahasa Jepang dan propaganda militer (Susila, 1994). Sekolah-sekolah kejuruan yang relevan dengan industri militer juga diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam mendukung usaha memenangkan perang. Meskipun pendidikan teknis dan kejuruan ditingkatkan, kondisi pendidikan secara umum memburuk karena sumber daya pendidikan dialihkan untuk kepentingan militer (Susila, 1994). Contoh sekolah lanjutan di Blitar yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1943, yaitu Sekolah Guru Laki-laki (SGL) dengan masa studi 4 tahun, dikenal sebagai *Danshi Sihan Gakko*.

Sekolah ini merupakan perubahan dari *Jongens Normaalschool* (Sekolah Guru Laki-laki pada masa Hindia Belanda). Selain itu, didirikan juga Sekolah Guru Putri (SGP) atau *Joshi Sihan Gakko*, yang merupakan perubahan dari *Meisjes Normaalschool* (Sekolah Guru Putri pada masa Hindia Belanda) (Susila, 1994). Lokasi yang ditempat SGL sekarang menjadi SMAN 1 Blitar, sedangkan SGP ditempati Kampus 3 Universitas Negeri Malang di Blitar Noor dalam (Susila, 1994). Perlakuan tentara Jepang yang tidak beradab menyebabkan kekecewaan mendalam bagi rakyat Indonesia dan menyebabkan munculnya perlawanan. Misalnya yang dilakukan oleh anggota prajurit *Dai Ni Daidan* Peta Blitar. Salah satu pencetusnya adalah Supriyadi. Supriyadi dan kawan-kawannya melakukan perlawanan setelah melihat perlakuan keji tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia (Dewi, 2019).

b. Blitar Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Sebagai kota kecil, berita proklamasi terlambat menyebar di Blitar. Berita proklamasi diterima kurang lebih tiga hari setelah peristiwa di Jakarta, jadi sekitar tanggal 20 Agustus 1945. Berita proklamasi tersebut berasal dari kurir yang datang dari Kediri dan juga dari Jawatan Kereta Api yang menyebarkan bahwa KA (Kereta Api) sudah merdeka Noor dalam (Susila, 1994). Saat instruksi pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dari pusat diterima, di Blitar juga dibentuk BKR di bawah pimpinan Suhud, sedangkan BKR Keresidenan Kediri dipimpin R. Soerachmad, bekas komandan batalyon Peta Blitar (Sudarno, 1993). Setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama pada 21 Juli 1947, kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya ada di Malang, dipindah ke Blitar. Kondisi Blitar yang relatif aman menjadikan Blitar yang dipilih sebagai tempat kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur pada saat itu (Tim Penyusun Buku Kirab Pemerintahan Darurat RI di Jawa Timur, 1994).

2. Pihak yang Bertikai

a. Republik Indonesia (Pemerintahan Militer & Pasukan Tempur di Tingkat Lokal Blitar)

Setelah Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947, Blitar menjadi daerah penampungan bagi pasukan hijrah. Pasukan hijrah adalah pasukan dari daerah kantong karena Persetujuan *Renville* terpaksa meninggalkan tempat-tempat yang strategis. Pasukan Hijrah tersebut pindah ke daerah *Renville* atau daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Penyebutan unit militer dalam artikel ini berdasar Penyempurnaan Organisasi Militer ke IV untuk lebih lanjut, lihat Semdam VIII (Brawidjaja, 1968). Beberapa unit militer yang berpindah antara lain Brigade III Damarwulan yang dipimpin oleh Letkol. Moh. Sroedji yang hijrah dari daerah Keresidenan Besuki (pasukan ini nantinya akan kembali ke Besuki saat agresi militer Belanda II) Brigade XVI yang dipimpin oleh Letkol. J. F. Warouw Detasemen I Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP Brigade XVII, dipimpin oleh Mayor Isman.

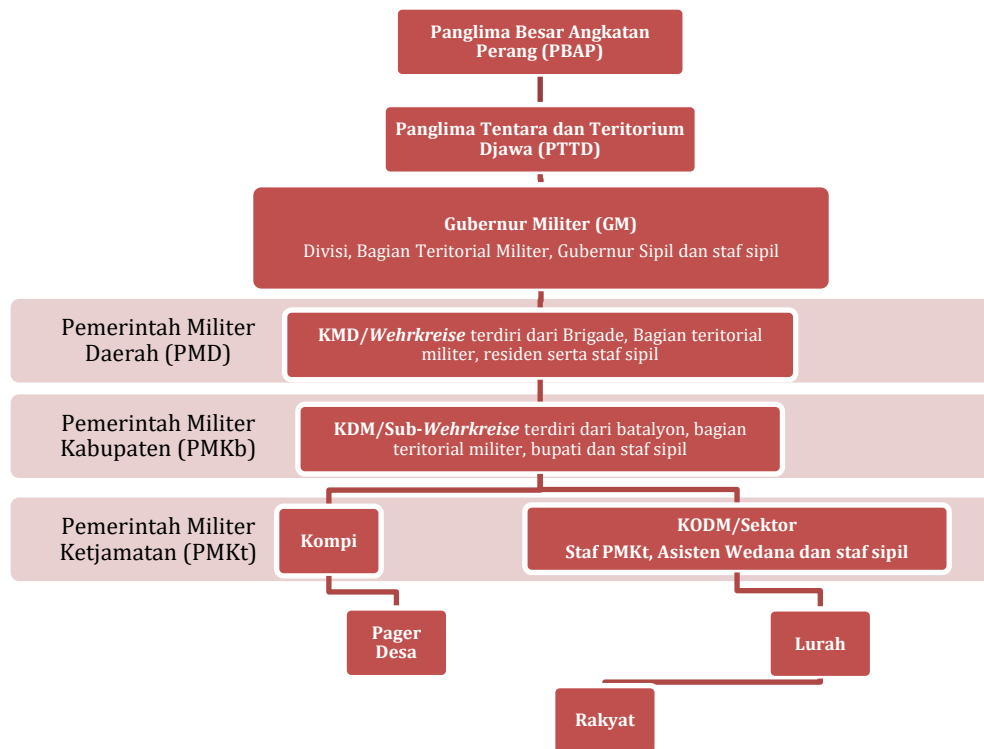
Selain itu juga ada pasukan dari Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Sebagian dari pasukan ALRI pada masa agresi kedua juga melakukan *wingate* dari Blitar menuju daerah pendudukan Belanda di Probolinggo (Sadjadi et al., 1997). Pada masa Agresi Militer Belanda yang kedua, di Blitar terdapat pasukan TNI dari batalyon *mobile* di bawah komando Brigade II. Batalyon tersebut adalah Batalyon 20 Branjangan pimpinan Mayor Moedjajin dan Batalyon Sikatan dikomandoi Mayor Sabirin Mochtar. Selain pasukan tempur, di Blitar terdapat satuan teritorial di bawah Komando Distrik Militer (KDM) yang bertugas membantu pasukan *mobile* dalam melawan Belanda. KDM Blitar dibantu pasukan-pasukan Brantas dan Kelud (Soerachmad, 2004).

Pasukan Brantas merupakan adalah batalyon yang dibentuk sesudah agresi kedua Belanda. Senjatanya terdiri dari sisa-sisa senjata Pasukan Pesindo Blitar dan pasukan BPRI dengan pangkalan operasi di daerah Suruhwadang. Komandannya adalah Nata (Lucas et al., 2012; Poeze, 2019). Selain itu, juga terdapat pasukan dari Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh R. Sadikun, salah satu tempat yang dijadikan sebagai markas pasukan polisi adalah daerah Gogoniti (Hadiman & Suparmin, 1989). Setelah pemimpin negara ditahan oleh Belanda pada Agresi Militer Belanda yang kedua pada 19 Desember 1948, pihak militer kemudian berinisiatif mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan pemerintahan (Sapto, 2018).

Hal yang dilakukan pihak militer dengan menyusun pemerintahan militer dimana Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) mengeluarkan Maklumat No. 2/MBKD tanggal 22 Desember 1948 menyatakan berlakunya pemerintahan militer. Pada Pulau Jawa dengan susunan dari atas ke bawah: Panglima Besar Angkatan Perang, Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD), Gubernur Militer (GM), Komando Daerah Militer (KDM) atau *Sub-Teritorial Commando* (STC), Komando *Order*-Distrik Militer (KODM), Lurah, Kader Desa, Kader Dukuh (Djamhari dalam Susila, 1994). Pimpinan pemerintah sipil yang terdiri atas Residen dan Bupati diperbantukan kepada pemerintahan militer, tetapi jabatan Gubernur dihapuskan dan para gubernur dijadikan penasihat Gubernur Militer.

Dalam pemerintahan militer ini Gubernur Militer, KMD dan KDM hanya merupakan koordinasi semata, karena pusat-pusat pemerintahan daerah, kota-kota kecil dan besar sudah dikuasai Belanda (Susila, 1994). Kekuasaan yang berada di bawah Republik pada tingkat kecamatan/KODM. Sementara di tingkat desa sepenuhnya pemerintahan sipil yang pejabatnya dipilih oleh rakyat. Tujuan dibentuknya pemerintahan militer itu adalah untuk menyelamatkan republik supaya tetap berjuang sebagai negara, pemerintahan harus berjalan terus dan pemerintahan militer itu semata-mata adalah alat perjuangan yang berkewajiban menyusun tenaga dan mengarahkan alat-alat perjuangan

guna menyelamatkan negara. Jadi pada dasarnya tugas utama dari keseluruhan administrasi militer adalah menjamin perbekalan pasukan-pasukan tempur. Struktur pemerintahan militer berdasarkan Pedoman Bekerja untuk Pemerintahan Militer Kecamatan yang dikeluarkan MBKD adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Struktur Pemerintahan Militer Desember 1948 (Nasution, 1979).

Melalui pemancar radio di Bedengan pengumuman berlakunya pemerintahan militer dari MBKD dapat diterima oleh pimpinan TRIP yang ada di Blitar. Pemancar radio ini merupakan usaha bersama antara TNI, PHB (Perhubungan) TGP dan TRIP. Pimpinan dari pemancar ini adalah Harmono dengan sejumlah anggota TGP sebagai tenaga teknis, sedang TRIP berfungsi sebagai Staf *Dekking*. Tenaga teknis ini masih diperkuat oleh Bambang Sumantri pegawai RRI Blitar. Dengan adanya pemancar radio telegraf ini maka kesatuan-kesatuan TNI yang ada di Blitar, khususnya TRIP dan TGP dengan cepat mampu menerima instruksi-instruksi dari instansi atas (Moehkardi, 1983). Dalam pemerintahan militer ini TRIP banyak berperan di daerah Blitar utara. Pada saat itu yang menjadi komandan KDM atau Komando Militer Kabupaten Blitar (KMKB) adalah Mayor Frieslan yang juga merangkap sebagai komandan KMKB utara. Untuk Komandan KMKB Selatan dijabat oleh Kapten Dedek Sumartono dari Batalyon 20 (Branjangan).

Blitar bagian selatan lebih banyak merupakan daerah operasi kesatuan Batalyon Branjangan dan Polisi, TRIP tidak berada di daerah ini (Susila, 1994). Bupati Blitar Darmadi dengan sebagian stafnya juga bergerilya di daerah Blitar bagian selatan. Pada perkembangannya, ada beberapa anggota TRIP yang menjabat dalam pemerintahan militer diantaranya, Isman sebagai Komandan KDM Blitar menggantikan Mayor Frieslan, Ismail K. Komandan KMK Blitar. Ishak Komandan KODM Nglegok, Cuk Suyono Komandan KODM Srengat, Murakhman Komandan KODM Gandusari, Daance Sukardani Komandan KODM Talun, Herman Nawawi Komandan KODM Sanankulon, Widarbo Komandan KODM Wlingi (Dinas Sejarah TNI AD, 1986). Sementara itu untuk

memperluas dan memperdalam kekuatan pertahanan, sebagai tenaga pasukan KODM, maka Kolonel A. H. Nasution mengeluarkan instruksi mengenai pembentukan Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa). Pelaksanaan pembentukan pager desa diserahkan kepada KODM setempat, untuk memberi latihan pertahanan dan kemiliteran kepada pemuda-pemuda yang bersedia menjadi Pager Desa.

Tugas Pager Desa pada umumnya adalah menjalankan perintah yang diberikan oleh KODM, di antaranya melakukan bumi hangus, pengintaian, perhubungan, penjagaan desa dan sebagainya (Susila, 1994). Untuk tugas itu TRIP berhasil membentuk Pager (pasukan gerilya) Desa, berkekuatan mencapai 40 orang yang dikomandoi oleh Taslin. Mereka mendapat latihan kemiliteran di daerah Salam. Pager desa yang dikomando oleh TRIP ini diberi nama Kompi Lahar (Susila, 1994). Pada perkembangan selanjutnya Kompi Lahar ini memiliki peranan yang besar dalam menunjang aksi perang gerilya, misalnya melakukan pengintaian dan perhubungan. Selama melakukan gerilya di wilayah Blitar, TRIP secara aktif terlibat dalam beberapa pertempuran melawan Belanda, yang menyebabkan gugurnya beberapa anggota mereka (Susila, 1994). Misalnya pertempuran di Desa Gadungan (Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar), dimana pada pertempuran tersebut terdapat empat anggota TRIP gugur yang pemakamannya disaksikan oleh warga Desa Gadungan, salah satunya adalah Supangi yang kemudian esok harinya desa itu dibombardir oleh tentara Belanda Ex Anggota Be 17 TRIP (Jawa Timur & Jarahdam, 1995; Soedarsono, 1987).

b. Pihak Belanda

Pasukan Belanda yang menduduki wilayah Blitar utamanya dari satuan Batalyon ke 4 *Garde Regiment Prinses Irene* (GRPI) dari *Koninklijke Landmacht* (KL) yang merupakan Angkatan Darat Kerajaan Belanda (berisi pelajar Belanda dan sukarelawan perang atau *OVW-Oorlogsvrijwilliger*) (Susila, 1994). Nama *Prinses Irene* diambil dari nama putri Ratu Juliana dari Belanda dan brigade ini dinamai sesuai dengan namanya. Batalyon ke 4 GRPI tergabung dalam Brigade Infanteri IV di bawah naungan Divisi A tentara Belanda di Jawa Timur bersama dengan Batalyon 4 *Garde Regiment Jager* yang menyerbu Blitar pada permulaan agresi kedua. Pasukan Belanda ini ditempatkan di bangunan SDK Santa Maria dan Hotel Asia (sekarang STIEKEN) (Susila, 1994).

Dalam melawan Belanda, taktik gerilya seperti penyergapan patroli, serangan gelap, sabotase dan penyusupan menjadi senjata utama para pejuang kemerdekaan. Hal semacam itu membuat Belanda kesulitan menghadapi musuh yang terus menerus muncul dan menghilang, sulit diidentifikasi dan memanfaatkan wilayah yang sulit dijangkau. Merespons aksi-aksi gerilya ini, tentara Belanda secara rutin melakukan *screening* atau pembersihan untuk membasmi pejuang kemerdekaan yang dianggap sebagai ancaman. Badan intelijen, seperti Gugus Intelijen dan Keamanan (*Inlichtingen en Veiligheidsgroepen* atau IVG) serta *Netherlands Forces Intelligence Service* (NEFIS), berperan penting dalam mengumpulkan informasi tentang identitas, lokasi dan rencana musuh.

Tugasnya mencakup kontra gerilya dan penguasaan wilayah, berdasarkan laporan Brigade 4 Tentara Belanda di wilayah Blitar juga ditempatkan satuan IVG yang berkedudukan di Blitar dan Wlingi. Satuan IVG di Kota Blitar pimpinan Letnan Groen dan wakilnya Sersan Hogervorst ditempatkan pada daerah Kepanjen Kidul, menempati bangunan Toko Dewa-Dewi (Susila, 1994). Sejumlah anggota IVG di bawah pimpinan Tio King Gwan pada masa akhir pendudukan Belanda nantinya menyerahkan diri kepada satuan TGP (Moehkardi, 1983). Selain pasukan yang sudah disebutkan di atas, Belanda juga masih mempunyai *Algemene Politie* (AP) atau Polisi Umum, *Onderneming Wacht* (OW) atau pengawal perkebunan (Susila, 1994).

3. Peranan Rakyat dalam Perang Gerilya Mempertahankan Kemerdekaan

Kontribusi rakyat desa dalam mempertahankan kemerdekaan di Blitar sangatlah penting dan beragam. Salah satu bentuk kontribusi yang signifikan adalah penyediaan makanan bagi tentara republik. Rakyat desa secara sukarela memberikan makanan yang mereka miliki kepada pasukan yang berjuang. Jika daerah tersebut gersang, maka makanan yang diberikan berupa jagung atau gaplek, sedangkan di daerah yang subur, makanan yang diterima oleh pasukan jauh lebih baik dengan adanya persawahan dan kolam ikan. Bantuan ini menunjukkan solidaritas dan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh pasukan republik dalam situasi perang yang sulit (Brawidjaja, 1971). Selain contohlain, menurut Sukadi salah seorang warga Desa Tegalasri, misalnya para pejuang TRIP menempati rumah-rumah penduduk desa dimana tiap rumah akan dihuni oleh tiga sampai empat orang pejuang TRIP yang akan dirawat oleh pemilik rumah yang ditempati.

Selain bantuan makanan, rakyat desa juga membantu pasukan republik dalam mendapatkan perbekalan lainnya melalui penghubung dalam, seperti yang dilakukan oleh Mispan, veteran asal Kecamatan Garum, Blitar. Penghubung ini biasanya adalah pedagang kecil yang bisa masuk dan keluar daerah musuh, membawa berbagai barang penting seperti pakaian seragam, sisir rambut, sikat gigi, hingga minyak rambut. Peran pedagang kecil ini sangat krusial karena mereka mampu menyusup ke daerah musuh dan membawa perbekalan yang sangat dibutuhkan oleh pasukan tanpa menarik perhatian musuh (Brawidjaja, 1971). Sebagian besar pedagang kecil yang bertugas sebagai mata-mata adalah wanita, seperti ibu dari Sukadi yang bertugas mencari informasi keadaan Kota Wlingi selama diduduki Belanda ketika menjual sayuran dari Desa Tegalasri.

Contohlain, selama perjalanan pasukan TRIP dari Tulungagung menuju Krisik, Blitar pada Maret-April 1949, bantuan rakyat desa kembali terbukti sangat berharga. Mereka tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga membantu secara langsung dalam operasi militer. Rakyat desa berperan sebagai tenaga pendorong dan penarik meriam, penyedia makanan bagi rombongan, hingga bergantian memikul peluru meriam. Mereka juga dengan sukarela menghilangkan jejak roda meriam untuk menghindari deteksi musuh. Bantuan ini memberikan suntikan semangat dan kekuatan bagi pasukan TRIP untuk terus berjuang melawan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan (Soedarsono et al., 1985; Widarbo et al., t.t.).

4. Peristiwa 1948-1949

a. Bumi Hangus Blitar

Jauh sebelum serangan Belanda tiba, kesatuan TGP Blitar telah mempersiapkan bumi hangus kota. Menurut Moehkardi (1983), tiap-tiap gedung vital yang telah ditentukan telah dipasang bom, seperti gedung Markas Batalyon *Mobile* Branjangan (kini SMKN 3 Blitar), Sekolah Guru Puteri (kini Kampus 3 Universitas Negeri Malang), Sekolah Guru Laki-Laki (kini SMAN 1 Blitar) Noor dalam Susila, (1994), Kantor Telepon, Kantor Pos, Kantor Bank Negara, Stasiun Kereta Api, Kantor Listrik dan lain-lain. Menjelang masuknya tentara Belanda ke Blitar, tiap gedung tersebut telah siap 2-3 orang anggota TGP yang bertugas meledakkan bom yang telah dipasang, bunyi ledakan besar di Markas Batalyon Branjangan menjadi aba-aba untuk bumi hangus. Pada tanggal 21 Desember 1948, sekitar jam 09.00 WIB pasukan pelopor Belanda yang dipelopori oleh kavaleri tiba di Kota Blitar. Pasukan Belanda tersebut adalah Brigade IV yang bergerak dari Malang Selatan-Kepanjen-Wlingi.

Menurut Moehkardi (1983) dari Wlingi pasukan Belanda terus mengambil jalan ke selatan lewat Lodoyo, dari Lodoyo terus melingkar ke utara lewat Garum dan baru masuk ke kota. Rute demikian jelas merupakan suatu taktik pendudukan, karena pihak

TNI semula menyangka Belanda akan datang melalui jalan raya Wlingi-Blitar, dimana menurut salah seorang veteran yaitu Kajat Suyono, para pejuang terkonsentrasi pada daerah ini. Meskipun demikian, kedatangan pasukan Belanda itu tidak membuyarkan rencana bumi hangus. Begitu pelopor mobil lapis baja dan *brencaier* Belanda tiba dari arah Garum, markas Batalyon Branjangan di jalan Garum langsung diledakkan. Ledakan hebat di markas Batalyon Branjangan ini segera disusul oleh ledakan-ledakan di berbagai gedung vital lainnya. Bumi hangus Kota Blitar berjalan sesuai dengan rencana. Hanya di Sekolah Guru Puteri saja, peledakan bom yang telah terpasang gagal, karena anggota TGP yang disertai tugas menyalakan sumbu api bom, lupa tak membawa korek api (Moehkardi, 1983).

b. TRIP dan Banteng Blorok

Meriam Banteng Blorok, pada mulanya, adalah senjata penangkis udara jenis 40 mm *Anti Aircraft Gun* yang diproduksi oleh Bofors Swedia. Senjata ini awalnya digunakan oleh *Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger* (KNIL) dalam perang Asia Timur Raya melawan Jepang. Setelah tentara Belanda menyerah kepada Jepang, meriam tersebut direbut Jepang digunakan sebagai pertahanan udara melawan Sekutu. Setelah Jepang menyerah, meriam tersebut jatuh ke tangan rakyat Indonesia (Jawa Timur & Jarahdam, 1995). Pada sekitar tahun 1947, meriam tersebut dipergunakan oleh Tentara Republik Indonesia untuk memperkuat sektor Utara Sungai Brantas, menjadi bagian dari pertahanan Surabaya.

Meriam ini mengalami kerusakan akibat serangan udara sekutu di sekitar Krian. Pada tahun 1948, meriam ini diperbaiki dan menjalani sejumlah modifikasi di pabrik senjata Kedung Banteng (Surakarta) dan kemudian diberi nama Banteng Blorok untuk menghormati kemampuan para teknisi pabrik senjata dalam memperbaiki meriam tersebut (Timur & Jarahdam, 1995). Pada masa Agresi Militer Belanda yang kedua, Kolonel Sungkono, Panglima Divisi 1 Jawa Timur kemudian mempercayakan pengawalan Banteng Blorok kepada TRIP. Duryatmodjo kemudian diamanahkan sebagai penanggung jawab pasukan pengawal meriam, dengan bantuan rakyat desa setempat, Banteng Blorok didorong dan ditarik dari wilayah Tulungagung menuju tempat yang direncanakan di wilayah Blitar menembus hutan jati dan perbukitan terjal (Timur & Jarahdam, 1995).

Selama perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju Krisik, Blitar (Maret-April 1949), anggota TRIP yang mengawal pergerakan meriam terlibat dalam beberapa pertempuran melawan Belanda, misalnya yang terjadi di Ngunut, Rejotangan dan Sutojayan (Timur & Jarahdam, 1995; Soedarsono, 1987). Situasi yang seperti itu membuat pasukan pengawal menjadi kelelahan. Namun, bantuan dari rakyat desa yang dilalui oleh rombongan memberikan suntikan semangat untuk tetap berjuang membela kemerdekaan. Bentuk bantuan rakyat desa diantaranya sebagai tenaga pendorong dan penarik meriam serta penyedia makan bagi rombongan hingga bergantian memikul peluru-peluru meriam. Rakyat desa juga dengan sukarela berusaha menghilangkan jejak roda meriam dengan menyapu beramai-ramai tanah bekas injakan roda meriam Banteng Blorok (Soedarsono, 1987; Widarbo dkk., t.t.).

c. Wlingi Berasap Mesiu (8 Mei 1949)

Serangan ke Wlingi, sudah berkali-kali dilakukan oleh pasukan republik. Tetapi, serangan-serangan yang dilakukan tidak bertujuan untuk merebut kota. Sifat serangan yang dilakukan pihak Indonesia hanya sebatas gangguan, berkali-kali dilakukan, agar pasukan Belanda tidak pernah merasa aman. Serangan itu juga bertujuan untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa eksistensi TNI dan gerilya Republik Indonesia masih ada. Pada tanggal 8 Mei 1949, kembali TNI melancarkan serangan atas Kota Wlingi. Serangan kali ini dilakukan oleh Batalyon Branjangan, Batalyon 37, Batalyon

Sikatan dan TGP (Soewito, 1994). Serangan umum dilakukan pada siang hari sekitar jam 15.00. Tanda serangan dimulai ketika meledaknya bom yang menghancurkan Jembatan Dander di sebelah barat Wlingi.

Bom tersebut ditanam oleh anggota TGP dari regu pimpinan Hidayat (Moehkardi, 1983). Penghancuran Jembatan Dander dimaksudkan untuk mencegah datangnya bala bantuan pasukan musuh dari arah Blitar. Sore harinya sekitar jam 18.00 pasukan republik ditarik mundur. Dalam serangan ini satu peleton TGP yang diperbantukan pada kesatuan TNI Batalyon Sikatan pimpinan Mayor Sabirin Muchtar terlibat pertempuran di Wlingi kehilangan satu anggota yang gugur, bernama Sukotjo dari Seksi Suseno Moehkardi (1983), sedangkan dari Batalyon 20 ada enam orang gugur yaitu Masyur, Suryadi, Ismajan, Sukardi, Mujiato, Suwadi. Batalyon 37 kehilangan tiga orang, Tarsam, Sukoco, Sukemi (Soewito, 1994). Batalyon Sikatan kehilangan 6 orang anggotanya Samsueroi, Samidjan, Moedjiono, Samsueroi, Marsam dan Sabar Komando Daerah Militer V (Brawijaya, 1988).

Soal korban, Irna H. N. Hadi Soewito (1994) menyebutkan bahwa jumlah korban di pihak Belanda 125 orang tewas. Laporan Batalyon 4 GRPI menyebut jumlah korban 150 orang. Pihak Belanda (Brigade, 1950), menyebut pasukan republik yang menyerang Wlingi berjumlah 700-800 orang dan mengklaim tidak ada korban di pihak mereka. Komando Daerah Militer V Brawijaya (1988) menyebutkan kerugian Belanda di Wlingi 22 serdadu tewas di depan pasar, di Beru 2 serdadu dan di Nambakeling 10 orang serdadu tewas, selain itu terdapat korban penduduk Beru 82 orang (yang kemungkinan dari tembakan membabi buta pasukan Belanda). Sebagai upaya untuk mengenang pertempuran di Wlingi, dibangun monumen di Lapangan Kenongo, Beru, Wlingi.

d. Serangan Umum Wlingi (Oktober 1949)

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan *Cease Fire Order* (CFO) yang berlangsung sejak 10 Agustus 1949, pada tanggal 22 Agustus 1949 diadakan perundingan antara Komandan Divisi I tentara Indonesia dengan Divisi A tentara Belanda yang diadakan di Kediri. Perundingan tersebut membicarakan mengenai pelaksanaan gencatan senjata di Jawa Timur (Soewito, 1994). Walaupun para komandan di lapangan telah mengetahui dan memahami perintah penghentian tembak menembak, namun di tempat-tempat rawan berbagai insiden tidak dapat dihindari. Suatu serangan TRIP yang cukup besar dekat dengan pelaksanaan *cease fire order* di Kota Wlingi. Berdasarkan Laporan *IVe Bataljon (Garde) Regiment 'Prinses Irene' (IV-(G)RPI)* tembak menembak antara TRIP dengan Belanda terjadi di Bulan Oktober.

Penyebabnya adalah camat republik diculik Belanda dan dibawa ke Wlingi. Terdapat perbedaan siapa pejabat yang diculik Belanda. Paguyuban MAS TRIP Jawa Timur (1998) menyebutkan bahwa camat yang diculik adalah Camat Talun dan Garum, sedangkan menurut Sagimun M. D. (1989) Ex Anggota Be 17 TRIP Jawa Timur & Jarahdam VIII (1995) dan Indrakusuma (1997), camat yang diculik adalah Camat Talun & Wlingi. Alasan penculikan tersebut karena TRIP posnya terlalu maju, pihak Belanda bersikeras bahwa pos yang didirikan oleh TRIP tidak ada di situ sebelumnya (Dinas Sejarah TNI AD, 1986). Pihak TRIP kemudian memberikan ultimatum yang ditulis oleh Mayor Isman, beliau menulis ultimatum yang intinya Segera bebaskan Camat Wlingi dan Camat Talun yang saudara tangkap, karena jika tidak segera dibebaskan, maka pasukan saya akan membatalkan gencatan senjata di daerah ini dan keselamatan saudara tidak saya jamin (Timur & Jarahdam, 1995).

Ultimatum yang diberikan tidak ditanggapi Belanda. TRIP lalu menyerang Wlingi dengan kekuatan Kompi II dan Kompi III. Tanda serangan yang dilakukan TRIP adalah ledakan bom di depan pos Belanda yang menempati kantor Kawedanan Wlingi. Pada serangan ini juga digunakan Meriam Banteng Blorok yang memuntahkan pelurunya ke

arah Wlingi. Namun beberapa peluru bukannya jatuh di posisi musuh, tetapi di dekat pasukan TRIP sendiri. Salah satu yang terkena pecahan peluru adalah Affandi, yang harus dievakuasi menuju Perkebunan Sirahkencong yang terdapat tempat pengobatan dan istirahat hingga gudang peluru. Walaupun Belanda di Wlingi tidak hancur atau Wlingi direbut, namun akibat serangan ini camat republik dibebaskan kembali.

e. Penyerahan Kedaulatan

Perjuangan melawan Belanda di wilayah Blitar hingga akhir tahun 1949 tidak pernah mengendur. Hal sama juga terjadi di daerah-daerah lain. Sementara itu, di tingkat yang lebih luas, Belanda juga harus menghadapi ancaman yang serius, misalnya dari pihak Amerika Serikat menekan Belanda dengan mengancam mencabut bantuan *Marshall Plan* Reid (1986) sedangkan di medan pertempuran, tekanan yang berasal dari pihak republik membuat pihak Belanda kelelahan. Walaupun TNI kekurangan senjata dan perlengkapan perang namun mendapat dukungan dari rakyat. Hal tersebut ditambah dengan dijadikannya Pulau Jawa sebagai medan tempur yang luas dengan konsep perlawanan gerilya. Kondisi yang melelahkan Belanda semacam itu, mendorong Belanda menerima saran untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Perjalanan perjuangan diplomasi cukup panjang hingga KMB. Beberapa tonggak perjuangan diplomasi yang penting diantaranya adalah Perjanjian Linggajati, *Renville* dan Roem-Royen. Pada akhirnya, tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun Belanda diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan. Bertempat di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan perwakilan dari Belanda, A. H. J. Lovink menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Pada waktu yang sama di Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A. M. J. A. Sassen dan ketua delegasi Republik Indonesia Serikat (RIS), Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah perjanjian. Maka secara formal Belanda mengakui kedaulatan penuh Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Irian (Papua) (Poesponegoro & Notosusanto; Nugroho., 2011).

5. Sejarah Lokal Masa Mempertahankan Kemerdekaan Sebagai Bahan Pengaya Pembelajaran Sejarah

Pembelajaran sejarah sering dianggap membosankan oleh siswa karena mereka melihatnya sebagai studi tentang peristiwa masa lalu yang tidak relevan dengan masa kini atau masa depan (Hamid, 2014). Untuk mengubah persepsi ini, guru sejarah perlu mengembangkan media pembelajaran yang kreatif, menarik, serta mampu membentuk karakter siswa yang cinta tanah air, kritis, dan konstruktif (Birsyada, Gularso, & Fairuzabadi, 2022). Seperti yang dinyatakan oleh Agung (2021) dimana pembelajaran sejarah harus terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh zaman, karena pada zaman globalisasi ini kemajuan teknologi yang pesat dan tidak dapat dihindari pengaruhnya pada dunia pendidikan (Ikhsani, 2023). Penggunaan bahan ajar memberikan variasi dalam proses pembelajaran sejarah. Meskipun beberapa sekolah sudah dilengkapi dengan komputer, proyektor maupun TV, guru sering menghadapi kendala karena terbatasnya materi yang tersedia untuk kegiatan belajar sejarah.

Jika kendala ini dapat diatasi, maka pembelajaran sejarah sebagai bentuk perjalanan intelektual di masa lalu, seperti yang disebutkan oleh Soedjatmoko dalam (Sayono, 2013) dapat terwujud. Dalam hal ini, sejarah lokal mengenai masa mempertahankan kemerdekaan di Blitar dapat dijadikan bahan ajar yang efektif dan menarik. Namun, salah satu hambatan pembelajaran di negara berkembang seperti Indonesia adalah akses menuju sumber primer (Widiadi, Sheehan & Shep, 2022). Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum Merdeka (Kurmer) pembelajaran sejarah dengan fokus pada masa mempertahankan kemerdekaan diajarkan di Fase

pendidik. Pada akhir fase ini, siswa diharapkan mampu memahami fakta sejarah, menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini dan masa depan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap situs-situs bersejarah (Kemdikbudristek, t.t.).

Keterampilan berpikir sejarah yang diharapkan meliputi kemampuan menganalisis dan mengevaluasi peristiwa sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global (Kemdikbudristek, t.t.). Tema-tema yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti sejarah lokal masa mempertahankan kemerdekaan di Blitar, dapat menjadi titik awal yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Sejarah lokal, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah (2021), adalah sejarah dari suatu tempat atau lokalitas yang batasannya ditentukan oleh penulis sejarah. Meskipun metode penelitian sejarah lokal dan nasional tidak jauh berbeda, sejarah lokal memerlukan teknik khusus dalam eksplorasi sumber sejarah karena cakupan wilayahnya yang terbatas (Sulistiyono, 2009).

Dalam konteks Blitar, sejarah lokal masa mempertahankan kemerdekaan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Hal ini memungkinkan siswa memahami sejarah dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Hariyono (2017) berpendapat bahwa untuk mengisi kekurangan pembahasan sejarah lokal, diperlukan sikap aktif dari pendidik atau guru untuk meneliti serta menulis sejarah lokal. Sebagai salah satu upaya, guru dapat memperluas tema penelitian dan melibatkan berbagai jenis sumber sejarah. Misalnya, bahan ajar yang disusun berdasarkan penelitian sejarah lokal Blitar dapat melibatkan kunjungan ke situs-situs bersejarah dan proyek-proyek penelitian sejarah lokal oleh siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga mengalami dan memahami sejarah daerah mereka sendiri secara lebih mendalam.

Kesimpulan

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap bahwa Blitar memainkan peran strategis sebagai basis gerilya Republik Indonesia selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai daerah yang pernah menjadi tempat perlindungan bagi pasukan hijrah setelah Agresi Militer Belanda I dan berfungsi sebagai daerah operasi militer selama Agresi Militer Belanda II. Pemerintahan militer yang didirikan di Blitar berhasil menjaga kontinuitas pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Timur, meskipun sebagian besar kota dan pusat pemerintahan telah dikuasai oleh Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Blitar tidak hanya sebagai wilayah administratif tetapi juga sebagai simbol perlawanan dan ketahanan Republik Indonesia dalam menghadapi penjajah. Kajian sejarah lokal Blitar, khususnya terkait perjuangan melawan penjajah, juga memiliki potensi yang besar sebagai materi pembelajaran. Materi yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang identitas lokal mereka. Integrasi sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan tidak hanya memberikan wawasan yang lebih luas tentang sejarah nasional tetapi juga memperkuat rasa bangga dan kesadaran akan pentingnya peran daerah mereka dalam konteks sejarah yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (2021). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agung, D. A. G. (2021). Pembelajaran Sejarah Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 4(1), 1.
- Brawidjaja, I. V. (1971). *25 Th Intdam Viii Brawidjaja 1945-1970*. Surabaya: Intdam Viii Brawidjaja.
- Brigade, I. (1950). *Oost Java: Gedenkboek der 4e Infanterie Brigade*. Tilburg: Drukkerij Henri Bergmans N.V.

- Birsyada, M. I., Gularso, D., & Fairuzabadi, M. (2022). Strategi Pengembangan Pembelajaran Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Berbasis Diorama Museum di Sekolah. *Diakronika*, 22(1), 76–95.
- Blitar, B. B. (2024). *Blitar dalam Angka (Vol. 39)*. Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar.
- Blitar, B. K. (2024). *Kota Blitar dalam Angka 2024 (Vol. 41; BPS Kota Blitar, Ed)*. Blitar: BPS Kota Blitar.
- Brawijaya, K. D. M. V. (1988). *Lintasan Kisah Sejarah Perjuangan Batalyon Sikatan Semasa Perang Gerilya*. Surabaya: Komando Daerah Militer V Brawijaya.
- Dewi, E. S. K. (2019). *Pengembangan Bahan Ajar Booklet Tentang Perlawanan Tentara Peta Untuk Pembelajaran Sejarah Kelas XI di SMAN 1 Talun Kabupaten Blitar/Edna Sari Kusuma Dewi*. Diploma Thesis, Universitas Negeri Malang.
- Dinas, S. T. A. (1986). *Perjuangan Pelajar Bersenjata TRIP Jawa Timur*. Jakarta: Dinas Pembinaan Mental TNI AD.
- Hadiman, H., & Suparmin. (1989). *Lintasan Perjalanan Kepolisian RI Sejak Proklamasi-1950*. Jakarta: POLRI.
- Hamid, A. R. (2014). *Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hariyono, H. (2017). Sejarah Lokal: Mengenal Yang Dekat, Memperluas Wawasan. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 11(2), 160-166.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Ikhsani, A. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Infografis Berbasis Instagram Pada Kajian Materi Tumbuhnya Jiwa Nasionalisme. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(1), 19-26.
- Indrakusuma, D. (1997). *Yang Konyol-Konyol dari Djliteng Soejoto Sebagai Anak Perjuangan*. Jakarta: PT Pandukarya Pustaka.
- Kementerian, P. K. R. dan P. T. (t.t.). Referensi Penerapan Capaian Pembelajaran Fase F. Diambil 15 Maret 2024, dari Platform Merdeka Mengajar website: <https://guru.kemdikbud.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/sd-sma/sejarah/fase-f/>,
- Lucas, A., Melati, S., Soeryana, P. C., & Leclerc, J. (2012). *Radikalisme Lokal: Oposisi dan Perlawanan Terhadap Pendudukan Jepang di Jawa (1942-1945)* (Anton. Lucas & Rumekso. Setyadi, Ed). Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Moehkardi. (1983). *Pelajar Pejuang TGP 1945-1950*. Surabaya: Yayasan Ex Batalyon TGP Brigade XVII.
- Nasution, A. H. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10: Perang Gerilya Semesta II*. Bandung: Disjarah AD & Angkasa.
- Penyusun, T. (1994). *Kirab Pemerintahan Darurat RI di Jawa Timur (R. Rahardjo, Ed)*. Surabaya: Himpunan Penulis dan Sastrawan MKGR Jawa Timur.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2011). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poeze, H. A. (2019). *Tan Malaka Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia jilid 4: September 1948-Desember 1949*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Reid, A. (1986). *Fase Kedua: Kemenangan Terakhir Juli 1947 sampai 1950. Dalam C. Wild & P. Carey (Ed.), Gelora Api Revolusi (hlm. 181–186)*. Jakarta: BBC Seksi Indonesia dan PT Gramedia.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sadjadi, I., Supriyono, & Salydar. (1997). *Sejarah Perjuangan PAS “O” 1945-1950*. Jakarta: Ikatan Keluarga PAS “O” & Yayasan Bina Nusantara Jakarta.

- Sagimun M. D. (1989). *MAS TRIP Dari Brigade Pertempuran ke Brigade Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sapto, A. (2018). *Republik dalam Pusaran Elit Sipil dan Militer*. Yogyakarta: Matapadi Presindo.
- Sasmita, N. (2011). Industrialisasi di Gemeente Blitar 1900-1942. *Citra Lekha*, 16(2), 1–18.
- Sayono, J. (2015). Pembelajaran Sejarah di Sekolah: Dari Pragmatis Ke Idealis. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1), 9-17.
- Semdam, V. B. (1968). *Sam Karya Bhirawa Anoraga: Sedjarah Militer Kodam VIII/Brawidjaja*. Malang: Semdam VIII/Brawidjaja.
- Soedarsono. (1987). *Merdeka, Merdeka dan Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Darmo
- Soedarsono, R. G., Suharsana, N. N., Sugito, S., Silitonga, H., & Tarigan, J. P. (1985). *Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan (A. Imran & Ariwiadi, Ed)*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata R. I.
- Soerachmad, S. (2004). *Satu Abad Memorabilia Soerachmad Pejuang Kemerdekaan Pendiri Divisi Brawijaya*. Jakarta: Millennium Publisher.
- Soewito, I. H. N. H. (1994). *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan 2*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudarno, & dkk. (1993). *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulistiyono, S. T. (2009). Penulisan Sejarah Lokal di Era Otonomi Daerah: Metode, Masalah dan Strategi. *Seminar Nasional Peningkatan Kompetensi Penelitian untuk Pengajaran Sejarah di Era Sertifikasi dan Otonomi Daerah*. Kudus.
- Susila, M. D. (1994). *TRIP Jawa Timur dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan di Daerah Blitar 1948-1949*. IKIP Malang.
- Timur, P. M. T. J. (1998). *Kisah Perjuangan TRIP Bukti Bhakti Pelajar Usia 15-20 Th pada Bangsa*. Jakarta: Paguyuban Mas Trip Jawa Timur.
- Timur, J., & Jarahdam, V. (1995). *TRIP: Peranan Meriam Gempur Banteng Blorok dalam Perang Kemerdekaan*. Surabaya: Ex Anggota Be 17 TRIP Jawa Timur.
- Widarbo, S. W., Doerjatmodjo, T. S. & Harmany. *Sejarah TRIP Daerah Kediri*.
- Widiadi, A. N., Sheehan, M., & Shep, S. (2022). The Potential of Web-Based Historical Sources as Learning Resources to Foster Students' Historical Thinking Skills. *Paramita: Historical Studies Journal*, 32(1).